

**PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BIRO UMUM DAN
PERLENGKAPAN SETDAPROVSU BERDASARKAN SAP**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Program Studi Akuntansi Pemeriksaan*



Oleh :

Nama : MUHARZAH GANEVIE
NPM : 1405170272
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : MUHARZAH GANEVIE
N P M : 1405170272
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA
BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDAPROVSU
BERDASARKAN SAP

Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Pengaji I

ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

Pengaji II

IKHSAN ABULILLAH, S.E., M.Si

Pembimbing

IKHSAN RAMBE, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : MUHARZAH GANEVIE
N P M : 1405170272
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
Judul Skripsi : PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA
BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDAPROVSU
BERDASARKAN SAP

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(IHSAN RAMBE, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHARZAH GANEVIE
NPM : 1405170272
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
Judul Penelitian : PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BIRO
UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDAPROVSU
BERDASARKAN SAP

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
09/2018 13	sub bab 1.1 sub bab 1.2		
14/2018 13	sub bab 1.3 sub bab 1.4 sub bab 1.5		
18/2018 13	sub bab 1.6		
21/2018 13	sub bab 1.7		

Pembimbing Skripsi

(IHSAN RAMBE, SE, M.Si)

Medan, Maret 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHARZAH GANEVIE
NPM : 1405170272
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDAPROVSU BERDASARKAN SAP

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan



MUHARZAH GANEVIE

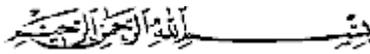
ABSTRAK

MUHARZAH GANEVIE, NPM. 1405170272. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu Berdasarkan SAP ,2018. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Penyusunan pelaporan keuangan yang diterapkan pada Biro Umum dan Perlengkapan setdaprovsu. Apakah proses penyusunan pelaporan keuangan, pencatatan dan prosedur akuntansi yang menerapkan sistem informasi daerah (SIMDA) telah sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan. Dalam melaksanakan penelitian, penulis mengumpulkan data menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara. Analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu metode analisis dimana data yang dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis berdasarkan keadaan yang sebenarnya sehingga memberikan keterangan yang lengkap dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tergolong baik, yaitu berdasarkan Prosedur Penganggaran, aplikasi SIMDA tersebut dapat membentuk suatu *database* anggaran kinerja/program/kegiatan Biro Umum selama satu tahun. Di tingkat Biro Umum prosedur penganggaran dalam aplikasi SIMDA Keuangan mencakup: 1) Penyusunan RKA- Biro Umum; 2) Penyusunan Anggaran Kas; dan Prosedur DPA. Kemudian berdasarkan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan merupakan prosedur yang digunakan untuk menatausahakan kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang berada dalam pengelolaan bendahara penerimaan. Untuk melakukan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan melalui aplikasi SIMDA Keuangan, terdapat dua prosedur yaitu prosedur penginputan Bukti Penerimaan dan prosedur penginputan Surat Tanda Setoran (STS). Kemudian berdasarkan Prosedur akuntansi dalam SIMDA Keuangan meliputi tiga hal yaitu: *input* saldo awal, *input* data transaksi, dan koreksi/penyesuaian. Dampak Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berdampak kepada kelengkapan, yaitu melalui SIMDA Data laporan keuangan dinas dapat diperoleh secara lengkap, berdampak kepada manfaat umpan balik, yaitu Melalui SIMDA Data yang ada dapat digunakan untuk memantau posisi keuangan dinas dan menilai kinerja dinas, dampak prediktif pengambilan keputusan, yaitu informasi yang dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan” dan “informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis laporan keuangan lebih lanjut, dan berdampak Indikator ketepatan waktu, yaitu Informasi dapat diperoleh saat dibutuhkan dan penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan *deadline* yang telah ditentukan.

Kata Kunci : Sistem informasi manajemen daerah , Pelaporan Keuangan, Pemerintah Daerah.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Biro Umum Dan Perlengkapan Setdaprovsu Berdasarkan SAP**”. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, agar kita menjadi orang-orang intelektual.

Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak kesulitan yang dihadapi, namun atas ridho Allah, berkat usaha, doa, motivasi dari orangtua dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda **Yuswin Amrizal** dan Ibunda tercinta **Sutri Indah Yanti** yang telah memotivasi, membimbing, mendoakan, mendidik, memberikan kasih sayang yang tulus serta materi yang selama ini kalian berikan kepada Ananda, sehingga Ananda bisa menjadi seperti sekarang ini. Kemudian penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak DR. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengenyam pendidikan tinggi di UMSU.
2. Bapak Januri S.E., M.M., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ihsan Rambe, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran pada penulis.
6. Buat seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Buat kakak Rizka Signorita Siregar A.Md selaku Staf di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
8. Buat adek tercinta Sakinah Uyun dan Sugeng Karunia yang telah memotivasi penulis hingga selesainya skripsi ini.
9. Buat kekasih dan teman-teman seperjuangan saya yang sangat membantu baik dalam bentuk dukungan, saran, masukan, doa dan keberadaan kalian dalam mendukung penyelesaian proposal ini.

Jika ada tulisan dalam skripsi ini yang kurang jelas atau salah ketik, penulis mohon maaf lahir dan batin, karena setiap insan pasti ada salah dan khilaf. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis. Amiin.

Medan, Maret 2018

Penulis

MUHARZAH GANEVIE

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan dan Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Uraian Teoritis	14
1. Standar Akuntansi Pemerintahan	14
a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan	14
b. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan.....	15
c. Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintahan.....	16
d. Basis Akuntansi Pemerintahan.....	16
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	18
a. Pengertian Sistem Akuntansi Daerah	18
b. Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	19
c. Ciri-Ciri Sitem Akuntansi Pemerintah.....	20
d. Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	20

e. Sistem Pencatatan.....	22
3. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	24
4. Laporan Keuangan	26
a. Pengertian Laporan Keuangan	26
b. Tujuan Laporan Keuangan.....	28
c. Kualitas Laporan Keuangan.....	30
5. Simda dan Efektifitas Laporan Keuangan Daerah	31
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Konseptual	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan Penelitian.....	38
B. Definisi Operasional Variabel	38
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpul Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Data Penelitian	42
1. Sejarah Singkat Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	42
2. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Umum Setdaprovsu	43
3. Struktur Organisasi Biro Umum Setdaprovsu	46
B. Hasil Penelitian	48

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utar.....	48
2. Dampak Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	52
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Biro Umum Provinsi Sumatera Utara.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur mengenai otonomi daerah di Indonesia dan sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi sudah mulai efektif dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Undang-undang tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan menggambarkan serta memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya.

Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada Pemerintah Pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengolahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah perlu menjalankan sistem akuntansi yang baik untuk mendukung pelaksanaan pemerintahannya. Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Deddi Nordiawan, 2010:201). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra-reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan

saldo kas. Dengan demikian reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah perubahan *single entry* menjadi *double entry*. *Single entry* pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan tingginya tuntutan perwujudan *good public governance*, perubahan tersebut dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan karena pengaplikasian *double entry* dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan *auditable*. Sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan pengembangan atas sistem akuntansi yang baru, yaitu:

1. Pengembangan sistem pembukuan berganda (*Double Entry*), dimana setiap transaksi dicatat dengan jurnal berpasangan, yaitu sisi debit dan sisi kredit.
2. Penggunaan basis akrual (*Accrual Basis*) dengan mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang. Dengan basis akrual, informasi yang akan diberikan kepada pemakai tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas, melainkan juga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas di masa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.

Pada bagian lain, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyusunan SAP Berbasis Akruaal dilakukan oleh Komite SAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Penyusunan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Biro Umum Sekretariat Daerah selaku entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan metode berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber

daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Dengan bergulirnya otonomi daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus dibuat oleh Kepala Daerah adalah berupa Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah. Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan daerah ini diberlakukan sejak 1 Januari 2001 sampai pada akhirnya saat ini pemerintah sudah mempunyai standar akuntansi pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah di dalam membangun sistem akuntansi keuangan daerahnya, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarkannya informasi operasi atau kegiatan.

Kebutuhan informasi yang akurat dan tepat waktu pada tahap pengambilan keputusan secara tidak langsung memberikan perubahan kepada banyak organisasi akan kebutuhan sistem informasi yang responsif terhadap kebutuhan mereka (Rahadi, 2007:10). Kebijakan dalam rangka pemanfaatan teknologi dan informasi oleh Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Bentuk dari pemanfaatan teknologi dan informasi yaitu dengan

diterapkannya aplikasi teknologi komputer sebagai salah satu alat bantu pada proses akuntansi.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang disediakan oleh BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Pengawasan Bidang Penyelenggaran Keuangan Daerah dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi yang terhubung langsung dengan database. Aplikasi itu adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), suatu aplikasi komputer yang merupakan salah satu dari komponen Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang disediakan sebagai aplikasi pembantu Pemerintah Daerah pada sistem akuntansinya mulai dari menyelenggarakan hingga mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan daerah.

Aplikasi SIMDA Keuangan yang diterapkan di Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini sudah mencapai versi 2.7.0.6 yang pengelolaan keuangan daerahnya secara terintegrasi meliputi penganggarn, penatausahaan dan pelaporan sebagai penyempurna versi-versi yang terdahulu. Program aplikasi SIMDA sudah mencakup berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, yaitu seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian pencatatan, pendokumentasian,

maupun pelaporan yang dilakukan secara manual dialihkan pada sistem komputerisasi yang telah terintegrasi kepada setiap SKPD.

Dalam penerapan SIMDA Biro Umum dan perlengkapan dalam proses pengelolaan keuangan daerahnya secara terintegrasi meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan. Proses penganggaran dapat berupa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penjabaran APBD maupun perubahannya serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) rancangan APBD. Proses penatausahaan seperti Surat Perintah Membayar, Surat Penyediaan Dana dan juga Surat Permintaan Pembayaran atau SPP, kemudian beserta register-register dan berbagai formulir pengendalian anggaran lainnya.

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa pengertian Akuntansi Keuangan Daerah dapat dibagi kedalam 2 pengertian menurut Abdul Halim (2012:27), yaitu pertama mengacu pada kegiatan administrasi atau pengurusan keuangan daerah, sehingga akuntansi keuangan daerah lebih diartikan sebagai tata usaha keuangan atau tata buku. Pengertian yang kedua mengacu pada kegiatan penyediaan informasi dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak *intern* maupun *ekstren* dari pemerintah daerah.

Pengertian kedua inilah yang lebih mencerminkan definisi Akuntansi karna ia tidak membatasi akuntansi hanya sebagai kegiatan administratif (yang tercermin dari istilah “tata buku”), namun menuntut adanya sistem yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan bagi pihak dalam dan luar entitas dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomisnya.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Provinsi Sumatera Utara menerapkan

SIMDA sebagai sistem informasi manajemen. Terdapat banyak paket aplikasi SIMDA yang diterapkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara di antaranya adalah SIMDA bidang Keuangan yang membantu dinas mengolah data keuangan serta melaporkan data keuangan ke instansi di atasnya. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara juga telah menerapkan SIMDA sejak tahun 2010.

Dalam penerapan SIMDA yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baru mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun 2014, 2015 dan 2016, hal ini mengalami peningkatan dalam kualitas laporan keuangan setelah penerapan aplikasi SIMDA, di mana dapat dilihat bahwa penggunaan aplikasi SIMDA memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tujuan penerapan SIMDA Keuangan ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya.

Dalam pelaksanaan dan penerapan SIMDA di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti kuantitas dan kualitas SDM yang masih kurang dalam pengelolaan SIMDA, dengan kenaikan aset dan kewajiban ekuitas yang terjadi di pemerintah provinsi Sumatera Utara, maka semakin kompleks pula masalah dalam proses pengelolaan keuangannya, penerapan SIMDA keuangan yang dilakukan diharapkan mampu

mempermudah pelaksanaan dalam proses laporan keuangannya, namun yang terjadi di pemerintah provinsi Sumatera Utara kenaikan tersebut tidak diiringi dengan perbaikan infrastruktur yang mendukung seperti pembangunan jaringan internet yang lancar tanpa hambatan dan mampu memperlancar pelaksanaan aplikasi SIMDA. Beberapa faktor lain yang masih memerlukan peningkatan dalam rangka mencapai opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) antara lain: kelemahan dalam pengelolaan barang/aset milik daerah, kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, masih lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah, dan kompetensi SDM pengelola keuangan daerah masih belum memadai.

Upaya pengawasan dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan asistensi kepada pemerintah daerah dan instansi vertikal di daerah. Selama tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya-upaya mencakup penguatan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan pendampingan penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), pendampingan pengelolaan keuangan daerah dengan implementasi aplikasi berbasis informasi teknologi yakni SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Gaji, SIMDA Pendapatan, dan SIMDA SAKIP, sinergi *review* atas LKPD dengan Inspektorat Provinsi, dan peningkatan kapasitas SDM APIP (Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah) daerah. Dalam hal akuntabilitas pengelolaan BUMD/RSUD/BLUD, telah dilakukan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). (Sumber:www.bpkp.go.id, diakses pada Februari 2018).

Demi terselenggaranya perhitungan Laporan Keuangan tentunya bukan pekerjaan yang mudah, diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan peralatan yang digunakan untuk menunjang penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah Pengelola Keuangan Penyelenggara Pemerintahan. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah membutuhkan pemahaman yang menyeluruh dari pelaksanaan manajemen keuangan daerah dan adanya penyempurnaan secara kontiniu dari instansi yang berwenang agar terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebagai bagian dari *good governance* dapat menjadi kenyataan.

Penulis juga ingin mengetahui apa yang menyebabkan keterlambatan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah karena penulis mengamati untuk tahun 2018 sementara Laporan Keuangan untuk tahun 2017 belum bisa dipublikasikan, sehingga Laporan Keuangan mengalami keterlambatan dalam pelaporannya. Keadaan ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Biro Umum Dan Perlengkapan Setdaprovsu Berdasarkan SAP”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Semakin kompleks masalah dalam proses pengelolaan keuangan.
2. Kelemahan dalam pengelolaan barang/aset milik daerah.
3. Lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah.

4. Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah masih belum memadai.
5. Sistem Informasi Manajemen Daerah pada laporan keuangan belum berjalan maksimal.
6. Terjadinya keterlambatan pemuatan laporan keuangan pada tahun 2017 dan 2018 pada SIMDA Keuangan Biro Umum Dan Perlengkapan Setdaprovsu.
7. Kuantitas dan kualitas SDM yang masih kurang dalam pengelolaan SIMDA.
8. Minimnya perbaikan infrastruktur yang mendukung penerapan SIMDA seperti pembangunan jaringan internet yang lancar tanpa hambatan dan mampu memperlancar pelaksanaan aplikasi SIMDA, dan lainnya.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Sesungguhnya banyak masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini, namun penulis membatasi masalah yang ada agar pemecahannya terarah dan berhasil. Mengingat keterbatasan waktu dan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis serta menghindari salah penafsiran dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membatasi masalah yang menyangkut penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dalam penyusunan laporan keuangan pada biro umum dan perlengkapan setdaprovsu berdasarkan SAP dengan penerapan berbasis akrual pada Laporan Keuangan Tahun 2015.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian ini

adalah:

- a. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan proses perencanaan dalam penyusunan laporan keuangan pada biro umum dan perlengkapan Setdaprovsu?
- b. Bagaimanakah dampak dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk biro umum dan perlengkapan Setdaprovsu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan proses perencanaan dalam penyusunan laporan keuangan pada biro umum dan perlengkapan Setdaprovsu.
- b. Untuk mengetahui dampak dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk biro umum dan perlengkapan Setdaprovsu.

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu berupa saran-saran yang konstruktif yang dipandang perlu oleh penulis guna mencapai tujuan.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta pola pikir penulis dalam menganalisis penerapan akuntansi daerah dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan SIMDA.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat sebagai referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Standar Akuntansi Pemerintahan

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Adapun pengertian standar akuntansi pemerintahan yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Tanjung (2012) dalam Vicky Agustiawan (2013) mengemukakan bahwa: “Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD”.

Menurut Indra Bastian (2010:138) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa: “Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, 2013).

1) Akuntabilitas

Di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Ps 23 ayat (5).

2) Manjerial

Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

3) Transparasi

Dalam pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful*. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

b. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan

Adapun tujuan standar akuntansi pemerintahan yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Indra Bastian (2010:138), tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah: “Meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah”. Sedangkan menurut Nurlan Darise (2008:39) mengemukakan bahwa: “Standar akuntansi pemerintahan digunakan sebagai pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan”.

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan standar akuntansi pemerintahan adalah pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah.

c. Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun kedudukan standar akuntansi pemerintahan yang dinyatakan oleh Indra Bastian (2010:139) sebagai berikut:

1. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada penerapannya, muncul kebutuhan akan upaya pengharmonisasian berbagai peraturan baik di Pemerintah pusat maupun di Pemerintah daerah dengan SAP.

d. Basis Akuntansi Pemerintahan

Dalam proses pencatatan dibutuhkan basis akuntansi dalam menentukan kapan transaksi atau kejadian harus diakui. Basis akuntansi pada umumnya ada

dua yaitu basis kas dan basis akrual. Menurut Nurlan Darise (2008:38) mengemukakan bahwa “Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan”.

Adapun basis akuntansi pemerintahan Menurut Erlina Rasdianto (2013:10) terdiri dari tiga basis yaitu:

1. Akuntansi berbasis kas;
2. Akuntansi berbasis akrual;
3. Akuntansi kas menuju akrual.

Adapun penjelasan basis akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Akuntansi berbasis kas

Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban.

- 2) Akuntansi berbasis akrual

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi akrual informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mewajibkan laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual, sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan masih menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual.

3) Akuntansi berbasis kas menuju akrual

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah wajib menggunakan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

a. Pengertian Sistem Akuntansi Daerah

Menurut Erlina Rasdianto (2013:6), sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Sistem Akuntansi Pemerintah daerah atau Sistem Akuntansi Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD/SAKD adalah Rangkaian sistemik dan prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan

fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah “Rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah”.

Sedangkan Menurut Deddi Nordiawan (2010:201) dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa:

Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan baik menggunakan metode manual maupun secara terkomputerisasi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak *intern* dan pihak *ekstern* pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

b. Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Nurlan Darise (2008:28) mengatakan bahwa tujuan akuntansi pemerintahan adalah:

- 1) Pertanggungjawaban. Memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.

- 2) Manajerial Akuntansi. Pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.
- 3) Pengawasan Akuntansi. Pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

c. Ciri-Ciri Sitem Akuntansi Pemerintah

Ciri-ciri terpenting atau persyaratan dari sistem akuntansi pemerintah (menurut United Nations/PBB dalam *bukunya A manual for Government Accounting, dikutipdari Buku Akuntansi Pemerintahan yang disusun oleh Sonny Loho & Sugiyanto*), antara lain disebutkan bahwa:

- 1) Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara.
- 2) Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditabel (artinya dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit).
- 3) Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan.

Neraca dan laporan arus kas merupakan bentuk laporan yang baru bagi pemerintah daerah dan untuk dapat menyusunnya diperlukan adanya suatu standar akuntansi. Akan tetapi selama ini, pemerintah daerah belum memiliki standar akuntansi, karena sistem akuntansi keuangan pemerintahan yang diterapkan sejak bangsa ini merdeka didasarkan atas UU Perbendaharaan Indonesia atau ICW *Staatblads* 1928, yang memang tidak diarahkan atau ditujukan untuk menghasilkan laporan neraca dan laporan arus kas.

d. Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Menurut Deddi Nordiawan (2010:201), Bastian (2010:319), dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

1. Pencatatan
2. Pengikhtisaran
3. Pelaporan

Adapun penjelasan sistem akuntansi keuangan sebagai berikut:

- 1) Pencatatan
 - a) Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
 - b) Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
 - c) Memindahbukukan (*posting*) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.
- 2) Pengikhtisaran
 - a) Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
 - b) Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling *up to date*.
 - c) Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.
 - d) Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal

akan nol.

- e) Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
 - f) Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.
- 3) Pelaporan setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.

e. Sistem Pencatatan

Sistem Pencatatan Menurut Erlina Rasdianto (2013:4) mengatakan bahwa akuntansi keuangan daerah terdapat proses pencatatan, pengidentifikasian dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Menurut Erlina Rasdianto (2013:4) dalam proses pencatatan yang merupakan salah satu proses akuntansi, akuntansi menggunakan sistem pencatatan.

Menurut Erlina Rasdianto (2013:4) Ada tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu:

1. *Single entry*
2. *Double entry*
3. *Triple entry*

Adapun penjelasan sistem pencatatan yaitu sebagai berikut:

- 1) *Single Entry*. Sistem pencatatan *single entry* disebut dengan sistem tata buku tunggal. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat ditambahkannya kas akan dicatat di sisi penerimaan di dalam Buku Kas Umum (BKU) sedangkan transaksi

yang berakibat kurangnya kas akan dicatat di sisi pengeluaran di dalam Buku Kas Umum. *Single entry* ini disebut dengan pembukuan, sedangkan dalam akuntansi sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem *double entry* atau *triple entry*.

- 2) *Double Entry* Sistem pencatatan *double entry* disebut sistem tata buku berpasangan. Pencatatan transaksi ekonomi dua kali, dalam arti bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu di sisi debit dan satu di sisi kredit. Setiap Pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem *double entry* sering disebut dengan istilah menjurnal. Pada masa sebelum reformasi, sistem pencatatan yang dilakukan oleh akuntansi keuangan daerah adalah sistem tata buku tunggal (*single entry*). Tetapi setelah reformasi yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem pencatatan *double entry*.
- 3) *Triple Entry*. Sistem pencatatan *triple entry* adalah sistem pencatatan yang menggunakan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada *double entry*. Dengan adanya pencatatan ini maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di anggaran pendapatan belanja daerah. Pencatatan dengan sistem *triple entry* ini dilaksanakan saat pencatatan *double entry* dilaksanakan, maka sub bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku

anggaran. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*double entry*) artinya bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu di sisi debit dan satu di sisi kredit.

3. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

SIMDA merupakan salah satu produk dari penerapan prinsip *e-Government* yang mulai muncul saat diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yaitu tentang Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* yang kemudian didukung oleh munculnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem informasi manajemen ini dikembangkan guna memudahkan kegiatan satuan kerja dalam mengelola keuangan mereka, sehingga pada akhirnya pengelolaan keuangan satuan kerja tersebut menjadi lebih efektif, efisien dan ekonomis.

SIMDA Keuangan juga berlandaskan pada Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. Dengan pertimbangan bahwa pemerintah merasa perlu adanya pengelolaan keuangan dengan berlandaskan pada penyelenggaraan informasi yang seluas-luasnya, hal ini seperti tercantum dalam Pasal 4 ayat 3 pada peraturan tersebut.

Menurut Sutanta (2003:43), “Sistem Informasi Manajemen mendukung tiga hal utama, pada proses perencanaan, pengendalian serta pengambilan keputusan”.

a. Tujuan SIMDA

- 1) Menyediakan Data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.
- 2) Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
- 3) Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.
- 4) Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

b. Output dari aplikasi SIMDA ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penganggaran: Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), APBD beserta perubahannya, dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- 2) Penatausahaan: Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian lainnya;
- 3) Akuntansi dan Pelaporan: Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Neraca.

4. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan yang dikemukakan oleh Indra Bastian (2010:9) sebagai berikut:“Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan”. Sementara menurut Mahmudi (2011:143) mengemukakan bahwa: “Laporan keuangan merupakan *output* dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan”.

Sedangkan menurut Erlina Rasdianto (2013:21) mengemukakan bahwa: “Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah proses akuntansi yang terstruktur dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak.

Laporan keuangan pemerintah disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan laporan keuangan pemerintah daerah (Indra Bastian, 2010:336).

Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut (Ardeno Kurniawan, 2012). Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat (Ardeno Kurniawan, 2012). Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Ardeno Kurniawan, 2012).

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas (Nurlan Darise, 2008:2). Salah satu indikator untuk mengetahui kejujuran dan kinerja pemerintah daerah adalah melalui laporan keuangannya (Ulum, 2008). Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Indra Bastian, 2010:9). Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan (Indra Bastian, 2010:9).

Laporan keuangan merupakan laporan yang memuat data maupun informasi keuangan suatu organisasi. Laporan keuangan merupakan hasil proses akuntansi yang diperuntukan sebagai sarana transfer informasi keuangan terutama kepada lingkungan luar organisasi (eksternal). Menurut Soemarsono (2004:34) Laporan keuangan dirancang untuk para pembuat keputusan (*decision maker*), terutama pihak di luar lingkungan perusahaan, mengenai bagaimana posisi keuangan serta hasil pencapaian usaha suatu organisasi. Sedangkan berdasar pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah merupakan bagian dari seluruh hak ataupun kewajiban daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahnya yang dinilai dengan uang maupun semua bentuk kekayaan yang berkaitan terhadap semua hak maupun kewajiban daerah tersebut.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Adapun tujuan laporan keuangan secara umum dan khusus yang dikemukakan Erlina Rasdianto (2013:21) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyajikan informasi mengenai:

1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca
3. Laporan operasional
4. Laporan perubahan ekuitas
5. dan catatan atas laporan keuangan

Adapun penjelasan dari tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. LRA Menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan surplus/defisit. pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

2) Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 31 Desember 2015. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas.

3) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE dapat menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan

Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. CaLK bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah yang dapat memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

c. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Iman Mulyana (2010:96) dalam Susilawati (2014) mengemukakan bahwa kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidak sesuaian, sertadicapai melalui pemeriksaan. Menurut Erlina Rasdianto (2013:8) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

- 1) Relevan;
- 2) Andal;
- 3) Dapat dibandingkan;
- 4) Dapat dipahami.

5. Simda dan Efektifitas Laporan Keuangan Daerah

Indikator efektivitas merupakan jangkauan dampak dari suatu program dalam mencapai tujuan program itu sendiri. Semakin besar kontribusi suatu program (*Output*) yang dihasilkan terhadap pencapaian maupun sasaran yang telah ditentukan, maka akan semakin efektif pula proses kerja unit organisasi tersebut. Seperti yang diungkapkan Gibson dalam Satries (2011:33), efektivitas terbagi dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Efektivitas individu, adalah tingkatan efektivitas paling dasar dimana hal yang paling ditekankan berkaitan dengan hasil karya individu tertentu dalam sebuah organisasi;
- b. Efektivitas kelompok yaitu efektivitas yang lebih menekankan kontribusi dari keseluruhan anggotanya; dan
- c. Efektivitas organisasi yaitu gabungan antara efektivitas kelompok serta efektivitas individu sehingga bersatu dan menghasilkan output yang lebih tinggi tingkatannya.

Kemudian agar laporan keuangan relevan dan efektif, maka sumber datanya harus dapat dipercaya, akurat, tepat waktunya dan disajikan dalam bentuk-bentuk yang cocok bagi setiap tingkat manajemen. Oleh karena itu dalam memenuhi tujuan laporan keuangan, proses tersebut haruslah dikembangkan dengan baik khususnya pada setiap tingkatan manajemen di seluruh organisasi. Sebagaimana menurut Hamilton (2009:6) Laporan keuangan yang efektif memerlukan kriteria: 1) Dapat dipercaya, 2) Ketepatan, 3) Tepat waktu, 4) Bentuk-bentuk laporan.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung dalam penelitian ini. Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap penelitian yang telah ada, peneliti tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan judul “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu”. Namun, peneliti menemukan penelitian yang masih berhubungan dengan judul penelitian tersebut, di antaranya adalah:

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1.	Sandi Sera Sinaga (2008)	Tinjauan atas Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah kabupaten Deli Serdang telah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah dengan peralatan yang kurang memadai yaitu sistem komputerisasi yang belum dikuasai dan jumlah komputer yang masih kurang sehingga penyusunan laporan keuangan mengalami keterlambatan. 2. Penyebab terjadinya keterlambatan penyusunan laporan keuangan salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang memadai dan mahir dalam aplikasi sistem akuntansi keuangan daerah di pemerintah kabupaten Deli Serdang berjumlah 5 orang dan seharusnya berjumlah 10 orang sehingga penyusunan laporan keuangan yang telah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah mengalami keterlambatan. 3. Pelaporan pertanggungjawaban pada akhir tahun yaitu Laporan Perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan arus kas dan neraca telah sesuai. Akan tetapi, format laporan pertanggungjawaban pada laporan perhitungan APBD kurang sesuai karena tidak adanya perbandingan dengan tahun sebelumnya, hanya sebatas satu periode saja sementara dalam PP no. 108 tahun 2000 harus ada perbandingan satu

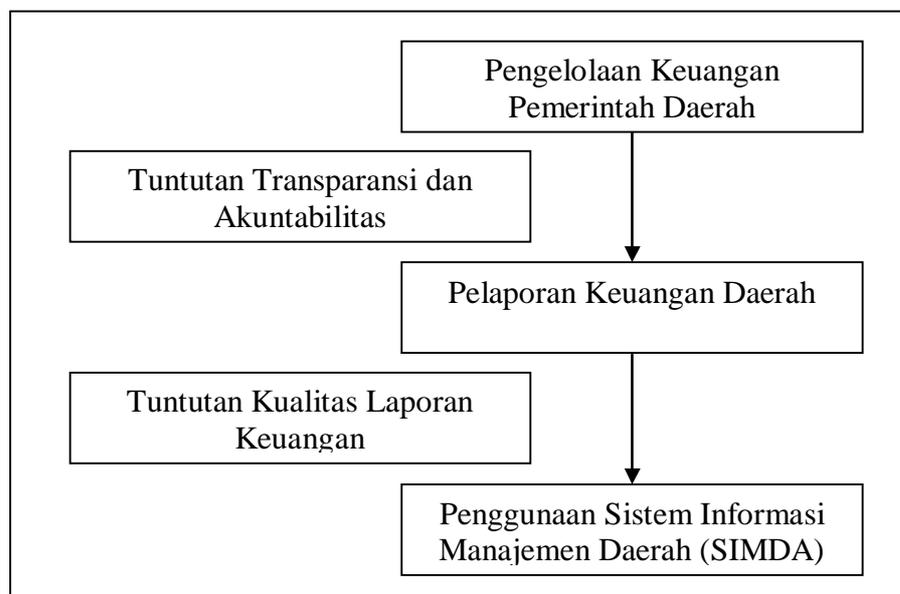
			<p>periode berjalan dengan periode sebelumnya. Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menggunakan prosedur akuntansi secara berganda walaupun secara manual, begitu juga dengan Laporan Arus Kas yang telah mencantumkan saldo awal tahun sebelumnya sesuai dengan PP No. 105 dan 108 tahun 2000. Neraca pada pemerintahan kabupaten Deli Serdang telah menggunakan T. <i>Account</i> sesuai dalam PP No. 105 dan 108 tahun 2000.</p> <p>4. Struktur organisasi pengelola keuangan pemerintah kabupaten Deli Serdang berbentuk garis, dimana atasan mempunyai sejumlah bawahan dan tanggungjawab langsung mengenai tugas-tugas atasannya. Hal ini dapat memudahkan koordinasi antara atasan dan bawahan serta memudahkan pengawasan oleh atasan kepada bawahan.</p> <p>5. Pengukuran Kinerja pemerintah kabupaten Deli Serdang dilakukan karena adanya ketentuan dari pemerintah pusat untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja bagi setiap instansi pemerintah.</p>
2.	Jojo Marito L.Toruan (2008)	Tinjauan Atas Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir.	<p>1. Dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah kabupaten Deli Serdang telah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah dengan peralatan yang kurang memadai yaitu sistem komputerisasi yang belum dikuasai dan jumlah komputer yang masih kurang sehingga penyusunan laporan keuangan mengalami keterlambatan.</p> <p>2. Penyebab terjadinya keterlambatan penyusunan laporan keuangan salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang memadai dan mahir dalam aplikasi sistem akuntansi keuangan daerah di pemerintah kabupaten Deli Serdang berjumlah 5 orang dan seharusnya berjumlah 10 orang sehingga penyusunan laporan keuangan yang telah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah mengalami keterlambatan.</p> <p>3. Pelaporan pertanggungjawaban pada akhir tahun yaitu Laporan Perhitungan APBD,</p>

			<p>nota perhitungan APBD, laporan arus kas dan neraca telah sesuai. Akan tetapi, format laporan pertanggungjawaban pada laporan perhitungan APBD kurang sesuai karena tidak adanya perbandingan dengan tahun sebelumnya, hanya sebatas satu periode saja sementara dalam PP no. 108 tahun 2000 harus ada perbandingan satu periode berjalan dengan periode sebelumnya. Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menggunakan prosedur akuntansi secara berganda walaupun secara manual, begitu juga dengan Laporan Arus Kas yang telah mencantumkan saldo awal tahun sebelumnya sesuai dengan PP No. 105 dan 108 tahun 2000. Neraca pada pemerintahan kabupaten Deli Serdang telah menggunakan T. <i>Account</i> sesuai dalam PP No. 105 dan 108 tahun 2000.</p> <p>4. Struktur organisasi pengelola keuangan pemerintah kabupaten Deli Serdang berbentuk garis, dimana atasan mempunyai sejumlah bawahan dan tanggungjawab langsung mengenai tugas-tugas atasannya. Hal ini dapat memudahkan koordinasi antara atasan dan bawahan serta memudahkan pengawasan oleh atasan kepada bawahan.</p>
3.	Maha putra dan Putra, (2014)	Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah	<p>1. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.</p> <p>2. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar</p> <p>3. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar</p> <p>4. Implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja</p>

			Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.
4.	Permadi (2013)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (studi kasus pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat)	Menyatakan berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan analasi kolerasi rank spearman menunjukkan nilai kolerasi rank spearman sebesar 0,506 memiliki tingkat hubungan yang sedang serta nilai positif menunjukkan peningkatan searah jika X naik maka Y naik atau sebaliknya dan hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa hanya 25.6% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,dengan kata lain masih ada variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan
5.	Imam Subaweh (2008)	Pengaruh Penerapan standar akuntansi pemerintahan Terhadap kualitas laporan keuangan	Terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang dipaparkan di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.

Pasal 23 ayat (1) Kepmendagri No. 13 Tahun 2006, mengemukakan: “Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak *intern* dan pihak *ekstern* pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Sedangkan Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dari teori-teori di atas, bahwa Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu dalam membuat dan melaporkan keuangannya dengan menerapkan SIMDA yang

mengacu pada sistem pemerintahan standar akuntansi pemerintah yang mengatur berbagai pedoman penyusunan akuntansi untuk membuat laporan keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu agar dapat menghasilkan *output* yang relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh berbagai kalangan.

Kerangka pemikiran sebagaimana digambarkan pada gambar 2.1 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan pembangunannya, pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut harus memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas, dan hal itu dimanifestasikan dalam bentuk Laporan Keuangan Daerah. Pelaporan keuangan daerah harus memenuhi syarat-syarat kualitas laporan keuangan yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, penggunaan SIMDA diharapkan dapat meningkatkan kualitas isi laporan keuangan daerah tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah terhadap fenomena-fenomena penelitian ini. Maka Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan berbentuk deskriptif.

Menurut Sugiyono (2013:47), pengertian metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

B. Definisi Operasional Variabel

Menurut Umi Narimawati (2010:31), definisi operasional variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadi *variable* yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan peneliti dalam mengoperasionalkan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian ini, maka perlu diberikan definisi variabel operasional yang akan diteliti. Adapun yang menjadi variabel penelitian ini adalah:

1. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan suatu sistem yang dapat membantu manajemen di dalam pengumpulan data,

pengolahan serta analisis evaluasi data dan menyajikan ke dalam batas informasi yang bernilai dan akhirnya sampai pada pengambilan keputusan di mana informasi ini berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen daerah.

2. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3. Laporan Keuangan adalah adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Biro Umum dan Perlengkapan SetdaprovSU yang beralamat jalan P. Diponegoro Nomor 30 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Proses waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Maret 2018.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/ Minggu																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan data, pengajuan judul, dan pengesahan judul			■	■																
2	Penulisan Proposal					■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal									■	■										
4	Seminar Proposal											■									
5	Riset												■								
6	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■	■	■
4	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif bersifat deskriptif. (sugiyono 2012 : 13) Penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif merupakan data yang terkumpul dalam bentuk kata atau gambar bukan dalam bentuk angka yang meliputi : sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, struktur organisasi organisasi, keadaan instansi pemerintah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data Sekunder yaitu data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data sekunder tersebut berupa laporan keuangan yang diperoleh dari Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu.

E. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan pustaka dari berbagai literatur karya ilmiah, majalah dan buku-buku yang menyangkut teori-teori yang relevan mengenai penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah.
2. Penelitian lapangan, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan di lokasi (objek penelitian) secara langsung, maupun di tempat lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Penelitian di lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen pada biro umum dan perlengkapan berupa laporan keuangan dan catatan-catatan yang tersimpan.
 - b. Wawancara
Wawancara adalah metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penelitian

1. Sejarah Singkat Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement Van Sumatera* dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di Kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera Utara kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidanan yaitu: Keresidanan Aceh, Keresidanan Sumatera Timur, Keresidanan Tapanuli.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi, masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintahan Darurat R.I No 22/PEM/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara diadukan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I pada tanggal 17 Desember 1949,

dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian dengan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 pada tanggal 15 April 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara.

Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Umum Setdaprovsu

Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 tahun 2011 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provsu. Biro Umum dan perlengkapan mempunyai tugas membantu Setdaprovsu dalam menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan pelaksanaan ketatausahaan/administrasi, arsip, rumah tangga, tata usaha kepegawaian dan keuangan, humas pimpinan, keprotokolan dan telekomunikasi.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas , Kepala Biro Umum dan perlengkapan dibantu:

- a. Bagian Arsip dan Tata Usaha;
- b. Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Keuangan;
- d. Bagian Humas Pimpinan, Keprotokolan dan Telekomunikasi.

Biro Umum dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyiapan dan mengkoordinasikan konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kerumahtanggaan, administrasi/arsip, ketatausahaan kepegawaian, keuangan, humas pimpinan, keprotokolan dan persandian;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang pengelolaan arsip/administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, tatalaksana rumah tangga, pelayanan humas pimpinan, keprotokolan, telekomunikasi dan persandian.

Kepala Biro Umum dan perlengkapan, mempunyai uraian tugas:

- a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Biro Umum;
- b. Menyelenggarakan penyempurnaan dan penetapan bahan/data di bidang urusan umum;
- c. Menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan di bidang penyelenggaraan di bidang umum, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Menyelenggarakan penetapan penyusunan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan urusan umum;
- e. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan umum di

bidang kearsipan/tata usaha, rumah tangga, tata usaha kepegawaian dan keuangan, humas pimpinan, keprotokolan dan telekomunikasi;

- f. Menyelenggarakan penetapan penyusunan kebijakan di bidang penyelenggaraan arsip/administrasi/tata usaha, rumah tangga, humas pimpinan, keprotokolan dan telekomunikasi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Menyelenggarakan konsultasi dan asistensi dalam penyelenggaraan urusan umum;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan urusan umum di bidang arsip/ketatausahaan/administrasi, rumah tangga, tata usaha kepegawaian, keuangan humas pimpinan, keprotokolan dan telekomunikasi;
- i. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan umum terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal/terkait, Lembaga, Yayasan, Pemerintah dan Kabupaten/Kota;
- j. Menyelenggarakan pengkajian dan analisa terhadap penyelenggaraan urusan umum;
- k. Menyelenggarakan klarifikasi terhadap penyelenggaraan urusan umum
- l. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pengawasan penyelenggaraan urusan umum, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- m. Menyelenggarakan pengembangan informasi dan komunikasi publik dalam penyelenggaraan urusan umum;
- n. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal lingkup Setdaprovsu;

- o. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pengadaan sarana dan prasarana, sesuai standar yang ditetapkan;
- p. Menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
- q. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Sekretaris Daerah, sesuai tugas dan fungsinya;
- r. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah, sesuai tugas dan fungsinya;
- s. Menyelenggarakan penetapan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.

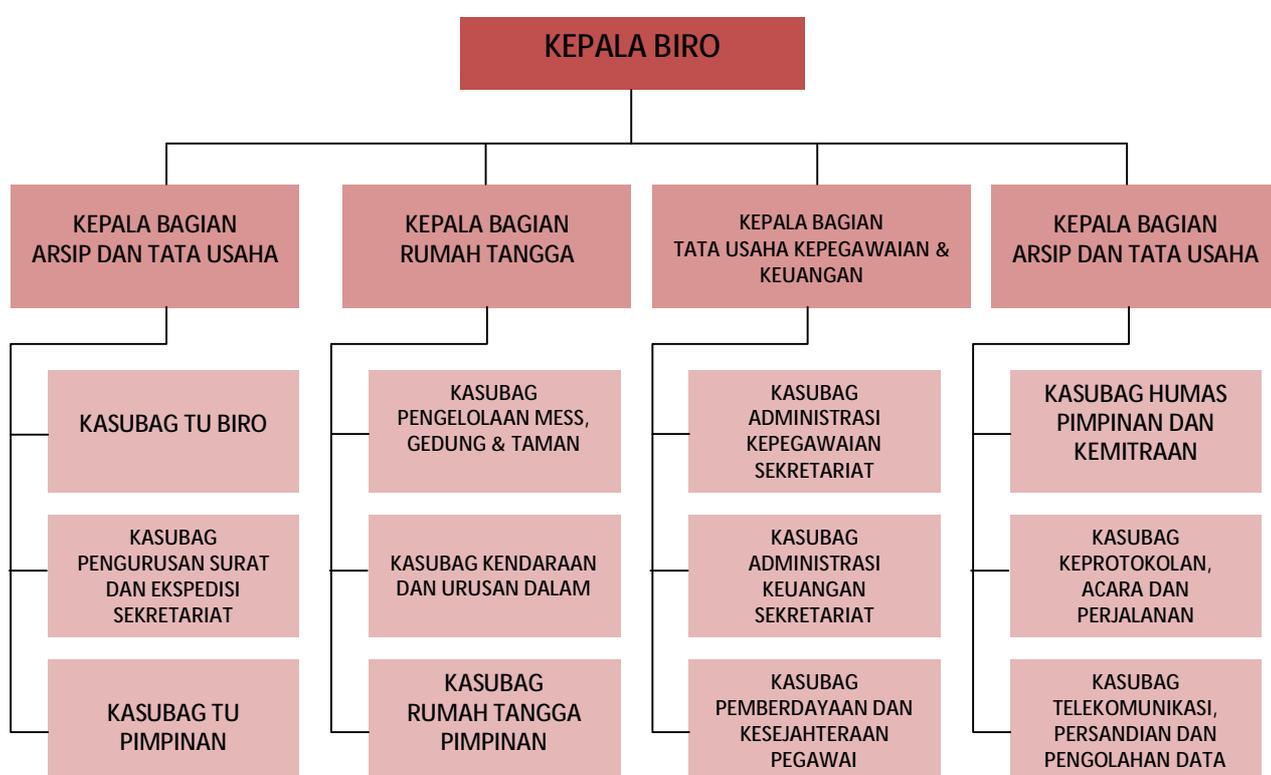
3. Struktur Organisasi Biro Umum Setdaprovsu

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Biro Umum Setdaprovsu didukung dan dibantu oleh:

- a. Bagian Arsip dan Tata Usaha dibantu:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - 2) Sub Bagian Pengurusan Surat dan Ekspedisi Sekretariat;
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.
- b. Bagian Rumah Tangga, dibantu:
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Mess, Gedung dan Taman;
 - 2) Sub Bagian Kendaraan dan Urusan Dalam;
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan.
- c. Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Keuangan, dibantu:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Kepegawaian Sekretariat;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat;

- 3) Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Pegawai.
- d. Bagian Humas Pimpinan, Keprotokolan dan Telekomunikasi dibantu:
- 1) Sub Bagian Humas Pimpinan dan Kemitraan;
 - 2) Sub Bagian Keprotokolan, Acara dan Perjalanan;
 - 3) Sub Bagian Telekomunikasi, Persandian dan Pengolahan Data.

Secara mudah struktur organisasi Biro Umum dapat kita lihat dari gambar berikut:



Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Biro Umum Provinsi Sumatera Utara

Tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan Biro Umum umum dan perlengkapan Setdaprovsu Tahun 2015 ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Biro Umum dan perlengkapan yaitu :

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
- c. Peningkatan kinerja yang memiliki kualitas dan profesionalisme yang sesuai dengan tuntutan tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang efektif, efisien dan responsif.
- d. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Umum Setdaprovsu Tahun 2013-2018.
- e. memaparkan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Umum Setdaprovsu mencakup realisasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2015.

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Pemerintah Daerah perlu menjalankan sistem akuntansi yang baik untuk mendukung pelaksanaan pemerintahannya. Pengertian Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan (neraca) dan operasi keuangan pemerintah (LRA).

Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah harus disusun dalam bentuk produk hukum pemerintah daerah yang berperan juga sebagai Manual Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah kegiatan pengelolaan keuangan daerah mencakup kegiatan penganggaran, penatausahaan keuangan (prosedur tata usaha keuangan penerimaan/pengeluaran kas), dan

pelaporan atau prosedur akuntansi. Sementara itu Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, prosedur yang dicakup oleh aplikasi SIMDA Keuangan meliputi: prosedur Anggaran (RKA, DPA), prosedur pada PPKSKPD (Verifikasi, Perbendaharaan, dan Akuntansi), prosedur Bendahara Pengeluaran, dan prosedur Bendahara Penerimaan.

Pada saat ini Biro umum dan perlengkapan menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah dengan prosedur yang sudah terkomputerisasi yaitu Sistem Manajemen Daerah (SIMDA).

Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

Fungsi utama penerapan SIMDA Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban);
- b. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat;
- c. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya;
- d. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan; dan
- e. Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi *Electronic Data Processing (EDP) audit*.

Berikut adalah uraian prosedur pengelolaan keuangan dengan aplikasi SIMDA Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara:

a. Prosedur Penganggaran

Prosedur penganggaran tahap awal dalam pengolahan data keuangan, prosedur ini membentuk suatu *database* anggaran kinerja/program/kegiatan Biro Umum selama satu tahun. Di tingkat Biro Umum prosedur penganggaran dalam aplikasi SIMDA Keuangan mencakup:

- 1) Penyusunan RKA- Biro Umum;
- 2) Penyusunan Anggaran Kas;
- 3) Prosedur DPA.

b. Prosedur Penatausahaan Penerimaan Kas

Prosedur penatausahaan Bendahara Penerimaan merupakan Prosedur yang digunakan untuk menatausahakan kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang berada dalam pengelolaan bendahara penerimaan. Untuk melakukan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan melalui aplikasi SIMDA Keuangan, terdapat dua prosedur yaitu prosedur penginputan Bukti Penerimaan dan prosedur penginputan Surat Tanda Setoran (STS).

c. Prosedur Pengelolaan Pengeluaran Kas

Langkah pertama prosedur penatausahaan pengeluaran kas adalah penerbitan SPD (Surat penyediaan dana), dokumen kesediaan dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) melalui BUD

(Bendahara Umum Daerah) dan tidak dilakukan oleh operator SIMDA keuangan Biro Umum. Pembuatan SPD dilaksanakan dengan membuat rencana penggunaan dana sampai ke rekening rincian obyek.

Terdapat lima jenis pembayaran dalam aplikasi SIMDA Keuangan, yaitu pembayaran Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambah Uang Persediaan (TU), Langsung (LS), dan Nihil. Dalam aplikasi SIMDA Keuangan prosedur penatausahaan pengeluaran kas meliputi penatausahaan sebagai berikut:

- 1) Pembuatan SPP & verifikasi SPP;
- 2) Penerbitan SPM & verifikasi SPM;
- 3) Penerbitan SP2D & verifikasi SP2D;
- 4) Pemberian panjar, SPJ Panjar, dan pengembalian panjar;
- 5) Pembuatan SPJ dan pengesahan SPJ;
- 6) Penerimaan dan penyetoran pajak.

d. Prosedur Akuntansi dan Pelaporan

Prosedur akuntansi dalam SIMDA Keuangan meliputi tiga hal yaitu: *input* saldo awal, *input* data transaksi, dan koreksi/penyesuaian. Sementara prosedur pelaporan dimaksudkan untuk pengiriman *database* keuangan yang telah tersimpan dalam aplikasi SIMDA Keuangan ke server Pemprov. dan DP2KAD melalui server Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Prosedur ini dilakukan untuk keperluan rekonsiliasi laporan keuangan Pemprov. Dalam SIMDA Keuangan laporan keuangan dapat ditampilkan dalam bentuk sesuai dengan format dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, juga dapat dalam format sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PP Nomor 71 tahun 2010.

2. Dampak Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Untuk melihat dampak Penerapan SIMDA dalam memberikan laporan keuangan yang berkualitas secara lebih teliti, peneliti melakukan wawancara kepada pihak Operator SIMDA Keuangan Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Utara. Adapun wawancara yang dilakukan adalah dengan mengukur kualitas laporan keuangan pada para pejabat di lingkungan Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Utara. Dimensi wawancara yang digunakan mencakup enam dari 10 dimensi kualitas laporan keuangan menurut Bastian (2010:94-96) yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, penyajian jujur, kelengkapan, dan dapat dibandingkan.

Lima dimensi ini dikelompokkan dalam empat dimensi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mendaftarkan empat dimensi yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat dimensi ini dapat ditarik dari teori kualitas laporan keuangan yang dinyatakan oleh Cramer dan Thomas (1969 dalam Abubakar, 2011:4). Empat dimensi ini kemudian diadopsi oleh IASC (*International Accounting Standards Committee*) (Gu dan Li, 2011:202) dan ditransfer pada PP Nomor 71 tahun 2010. Relevansi dan reliabilitas tergolong sebagai kualitas fundamental, sementara dapat dibandingkan dan dapat dipahami tergolong kualitas penguat (Agyei-Mensah, 2013:270). Penyajian jujur digolongkan sebagai dimensi keandalan sementara kelengkapan tergolong pada dimensi relevan.

a. Kelengkapan

Indikator kelengkapan dalam penelitian ini diukur dengan pertanyaan bahwa “Melalui SIMDA Data laporan keuangan dinas dapat diperoleh secara lengkap”. Menurut operator SIMDA sepakat untuk setuju dengan pernyataan ini. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa dampak SIMDA pada kelengkapan laporan keuangan tergolong baik.

b. Manfaat Umpan Balik

Indikator manfaat umpan balik dalam penelitian ini diukur dengan pertanyaan bahwa “Melalui SIMDA Data yang ada dapat digunakan untuk memantau posisi keuangan dinas dan menilai kinerja dinas”. Kembali operator SIMDA setuju dengan pernyataan ini. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa efek SIMDA pada kemampuan pemantauan posisi keuangan dan penilaian kinerja dinas tergolong baik.

c. Manfaat Prediktif Pengambilan Keputusan

Indikator manfaat prediktif pengambilan keputusan dalam penelitian ini diukur oleh dua item yaitu “informasi yang dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan” dan “informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis laporan keuangan lebih lanjut.” Untuk pernyataan tentang kemampuan SIMDA mendukung proses pengambilan keputusan, operator SIMDA menyatakan sangat setuju. Sementara itu, untuk pernyataan tentang kemampuan SIMDA mendukung analisis laporan keuangan lebih lanjut, menyatakan setuju. SIMDA memberikan manfaat prediktif dalam pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA.

d. Ketepatan Waktu

Indikator ketepatan waktu dalam penelitian ini diukur oleh dua item yaitu “Informasi dapat diperoleh saat dibutuhkan” dan “penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan *deadline* yang telah ditentukan”. Untuk kemampuan SIMDA memberikan informasi saat diperlukan, responden menyatakan sangat setuju. Sementara itu, untuk kemampuan SIMDA dalam membantu penyusunan laporan keuangan tepat waktu sesuai *deadline* memberikan pendapat setuju. Maka kemampuan SIMDA dalam memberikan ketepatan waktu tergolong baik.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam reformasi anggaran dan keuangan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sangat beragam dan kompleks. Hal ini dapat dimaklumi karena selain peraturan yang belum difahami oleh semua pegawai yang terlibat dalam sistem pelaporan keuangan daerah, tetapi lebih dari pada itu adalah kesulitan yang diakibatkan oleh keseluruhan siklus keuangan Pemerintah Daerah. Mulai dari pengesahan anggaran sampai pada penyusunan laporan keuangan yang disebabkan oleh kompleksitas peraturan, kurangnya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, lemahnya koordinasi, dan tidak memadainya teknologi yang digunakan.

1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan proses perencanaan Keuangan Daerah di Biro Umum dan Perlengkapan

Proses pelaksanaan SIMDA Keuangan terkait pada biro umum dan perlengkapan setdaprovsu perannya dalam Administrasi yaitu mencakup

pengumpulan data keuangan, perencanaan anggaran, pertanggungjawaban serta pelaporan anggaran. Sehingga jika dikaitkan dengan apa yang diungkapkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2013:2) bahwasannya SIMDA Keuangan mencakup penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan maka dari itu telah terjadi kesesuaian di dalamnya. Di dalam aplikasi SIMDA Keuangan sudah dapat menjalankan prosedur Administrasi keuangan mulai dari proses penganggaran hingga pelaporan, serta hal-hal yang mendasar berkaitan dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) seperti perincian program anggaran yang digunakan dan lain-lain.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami bahwa dengan menerapkan SIMDA di Biro Umum dan Perlengkapan dapat memudahkan pengelolaan keuangan termasuk di dalamnya pelaporan keuangan, adanya efisiensi terkait waktu dan prosedur pengelolaan keuangan yang secara langsung akan berakibat pada tercapainya tujuan suatu organisasi, di mana SIMDA Keuangan memiliki peran dalam membantu individu dalam melakukan pekerjaannya dimulai dari tingkatan manajemen bawah hingga individu pada tingkat manajemen atas yaitu pimpinan dalam pengambilan keputusan, dimana keputusan sangat berpengaruh kepada efektivitas suatu organisasi, sehingga hal tersebut sesuai dengan pendapat Gibson dalam Satries (2011:33) bahwa efektivitas terbagi menjadi tiga yaitu efektivitas individu, efektivitas kelompok, dan efektivitas organisasi.

Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah secara terintegrasi, dimulai dari

penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. Pengelolaan Sistem Informasi memiliki asas keterbukaan dan mampu memberikan informasi secara cepat, sehingga dapat berguna bagi masyarakat, dan para *stake holder*.

Ciri utama SIMDA Keuangan adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan data keuangan pada pemerintah daerah. Secara umum pelaksanaan SIMDA Keuangan di Biro Keuangan telah membantu proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan provinsi Sumatera Utara.

2. Dampak Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Daerah pada Biro Umum dan Perlengkapan

Berdasarkan hasil penelitian terkait penerapan SIMDA Keuangan yang telah dilakukan bahwa SIMDA Keuangan sebagai suatu Sistem Informasi Manajemen mendukung tiga hal utama, pada proses perencanaan, pengendalian serta pengambilan keputusan menurut Sutanta (2003:43). Secara garis besar SIMDA Keuangan memberikan kontribusi terhadap ketiga proses tersebut yang kemudian berdampak pada tercapainya tujuan suatu organisasi, dalam penelitian ini yaitu berkontribusi terhadap proses pengelolaan keuangan terutama pada proses pelaporan keuangan, dengan adanya SIMDA Keuangan ketiga proses tersebut berjalan lebih mudah dan lebih efektif, hal ini dapat dihubungkan dengan pendapat yang dikemukakan Ulum (2012:28) bahwa efektifitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Apabila organisasi berhasil mencapai tujuannya maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan secara efektif. Hal paling penting yang perlu dicatat yaitu bahwa efektifitas tidak hanya menyatakan tentang berapa besar biaya yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas hanya memandang bagaimana

program dan kegiatan tersebut sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mendukung pendapat tersebut Widodo dalam Suranto (2007:27) juga menjelaskan bahwa efektivitas berarti dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diserahkan dan dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan dan sasaran. Ukuran keefektivan yang telah dibahas hanya sebatas perbandingan dengan teori efektifitas yang ada dengan tujuan menjawab prinsip efektifitas yang diharapkan.

Laporan keuangan dikatakan relevan dan efektif, haruslah memenuhi kriteria data dapat dipercaya, akurat, tepat waktunya dan disajikan dalam bentuk-bentuk yang cocok bagi setiap tingkat manajemen. Oleh karena itu dalam memenuhi tujuan laporan keuangan, proses tersebut harus dikembangkan dengan baik pada setiap tingkatan manajemen di seluruh organisasi. Kemudian, Menurut Hamilton (2009:6) bahwasannya Laporan keuangan yang dikategorikan efektif harus termasuk dalam beberapa kriteria yaitu : 1) Dapat dipercaya, 2) Ketepatan, 3) Tepat Waktu dan 4) Bentuk-bentuk Laporan.

Pada Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu, diperoleh hasil penelitian bahwa SIMDA dalam penyusunan laporan keuangan pada biro umum dan perlengkapan menghasilkan dampak yang baik dan dapat di gambarkan seperti berikut:

a. Dapat dipercaya

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa laporan yang dihasilkan melalui SIMDA Keuangan selama ini dapat dipercaya, sesuai dengan hasil pemaparan narasumber bahwa terdapat proses verifikasi ataupun pembahasan yang dilalui sebelum dilakukan pencairan, sehingga secara bersamaan laporan

keuangan telah sesuai mengingat jika terjadi kesalahan pasti telah terdeteksi pada saat dilakukannya verifikasi terkait pencairan aliran dana.

Suatu pengolahan data keuangan berbasis pengolahan data elektronik memerlukan suatu pengendalian *Intern* yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dirancang bisa mencapai efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan pelaporan keuangan. Terdapat beberapa jenis pengendalian *intern* yang diterapkan dalam pengelolaan data keuangan melalui aplikasi SIMDA Keuangan yang pertama adalah pengendalian akses dan wewenang *user*, hal ini memungkinkan pembatasan akses aplikasi SIMDA Keuangan yang ditujukan hanya kepada pihak tertentu seperti operator SIMDA Keuangan. Para operator yang merupakan bendahara pengeluaran pembantu setiap bidang dibekali *account* akses dan password sendiri.

Pengendalian wewenang user dilakukan dengan pembagian tingkat kewenangan, meliputi: administrator, supervisor, dan operator. Administrator memiliki kewenangan pembuatan user dan otoritas *user*, *setting* aplikasi, posting anggaran, dan *unposting* jurnal. Supervisor memiliki kewenangan mengotorisasi input data, maupun penyesuaian/koreksi. Operator hanya memiliki kewenangan untuk menginput data dan melihat laporan.

Yang kedua adalah pengendalian keamanan umum, hal ini dilakukan secara fisik (pemeliharaan *peripheral/hardware*) dengan membekali UPS pada setiap unit komputer server sebagai pengaman daya. Dalam hal pengamanan data, terdapat kebijakan larangan mengcopy data lewat media *flashdrive* agar komputer server tercegah dari penyebaran virus. Sedangkan untukantisipasi hilangnya data server selalu mengirimkan data *backup* ke server Biro Keuangan Setdaprovsu.

Yang ketiga adalah pengendalian menu berdasarkan fungsi untuk menjamin validitas input data aplikasi SIMDA Keuangan secara terintegrasi, maka diterapkan pengendalian berdasarkan fungsi-fungsi: penganggaran, pengendalian dilakukan dengan adanya jejak rekam (*log user*) pelaksana posting anggaran di tiap-tiap Biro Umum. Penatausahaan, pengendalian dilakukan dengan adanya peringatan apabila saldo sisa SPD (Surat Penyediaan Dana) tidak mencukupi untuk pengajuan SPP (Surat Pengajuan Pembayaran) ataupun untuk kegiatan yang sama dan belum dipertanggungjawabkan dan pembukuan, penatausahaan, validasi terhadap dokumen SPM (Surat Perintah Pembayaran) dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan menetapkan status draft, final atau batal.

b. Ketepatan

Jika dikaji dari ketepatan bentuk laporan keuangan terkait format dan bentuk laporan maka SIMDA Keuangan sudah memenuhi itu mengingat SIMDA Keuangan telah mengacu pada peraturan dan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Salah satu proses yang dilalui adalah di sebut rekonsiliasi yaitu pencocokan data-data transaksi yang ada.

Evaluasi terhadap penerapan SIMDA Keuangan dilakukan dengan membandingkan waktu standar dan waktu faktual setiap proses penyelesaian satu produk SIMDA Keuangan. Waktu standar adalah waktu penyelesaian *output* standar berdasarkan peraturan yang telah digariskan pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan waktu faktual adalah waktu penyelesaian *output* rata-rata yang biasa dihasilkan dalam penerapan SIMDA Keuangan.

SIMDA keuangan bekerja secara terintegritas yang terbagi ke dalam 3 bagian yaitu, bagian anggaran, Penatausahaan, akuntansi dan pelaporan. Setiap bagian bertanggungjawab atas tugasnya masing-masing, bagian anggaran bertanggungjawab untuk menyusun rencana kerja anggaran (RKA), dokumen pelaksana anggaran (DPA), serta surat penyedia dana (SPD). Bagian penatausahaan bertanggungjawab untuk menyusun surat perintah pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM), surat perintah pencairan dana (SP2D) serta surat surat lainnya, sedangkan bagian akuntansi bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan.

Laporan-laporan tersebut diproses secara otomatis dengan menggunakan SIMDA keuangan, setiap pegawai yang bertanggungjawab menyusun laporan hanya bertugas menginput data ke dalam sistem dan secara otomatis akan terolah sendiri sampai menghasilkan *output* yang diinginkan. Hal tersebut memudahkan tanggungjawab yang harus dikerjakan oleh para pegawai.

c. Tepat waktu

Diterapkannya SIMDA Keuangan ini maka runtutan proses penganggaran hingga penyusunan laporan keuangan menjadi lebih tepat waktu dan ringkas, ini dikarenakan sistem SIMDA Keuangan bersifat otomatis sehingga data hanya perlu satu kali *entry* kemudian data tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya.

d. Bentuk-bentuk laporan

Berdasar pada hasil pengamatan bahwa di dalam SIMDA Keuangan, Laporan Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara disusun dengan mengacu pada Format yang disajikan dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil penelitian SIMDA Keuangan memenuhi apa yang tertera dalam Biro Umum dan Perlengkapan berdasarkan SAP Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Biro Umum dan Perlengkapan setdaprovsu bahwa Komponen penyusun yang terdapat pada satu set laporan keuangan yaitu terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran maupun berbagai laporan finansial lainnya seperti NERACA, LRA, LO CALK dan lain-lain

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penyajian dan analisis yang telah penulis paparkan dan berdasarkan realita yang ada, maka akhir dari pembahasan penulisan skripsi ini penulis akan menyajikan beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab empat, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tergolong baik, yaitu berdasarkan Prosedur Penganggaran, aplikasi SIMDA tersebut dapat membentuk suatu *database* anggaran kinerja/program/kegiatan Biro Umum selama satu tahun. Di tingkat Biro Umum prosedur penganggaran dalam aplikasi SIMDA Keuangan mencakup:
1) Penyusunan RKA- Biro Umum; 2) Penyusunan Anggaran Kas; dan Prosedur DPA. Kemudian berdasarkan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan merupakan prosedur yang digunakan untuk menatausahakan kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang berada dalam pengelolaan bendahara penerimaan. Untuk melakukan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan melalui aplikasi SIMDA Keuangan, terdapat dua prosedur yaitu prosedur penginputan Bukti Penerimaan dan prosedur penginputan Surat Tanda Setoran (STS). Kemudian berdasarkan Prosedur akuntansi dalam

SIMDA Keuangan meliputi tiga hal yaitu: *input* saldo awal, *input* data transaksi, dan koreksi/penyesuaian. Sementara prosedur pelaporan dimaksudkan untuk pengiriman *database* keuangan yang telah tersimpan dalam aplikasi SIMDA Keuangan ke server Pemprov. dan DP2KAD melalui server Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2. Dampak Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berdampak kepada kelengkapan, yaitu melalui SIMDA Data laporan keuangan dinas dapat diperoleh secara lengkap, berdampak kepada manfaat umpan balik, yaitu Melalui SIMDA Data yang ada dapat digunakan untuk memantau posisi keuangan dinas dan menilai kinerja dinas, dampak prediktif pengambilan keputusan, yaitu informasi yang dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan” dan “informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis laporan keuangan lebih lanjut, dan berdampak Indikator ketepatan waktu, yaitu Informasi dapat diperoleh saat dibutuhkan dan penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan *deadline* yang telah ditentukan.

B. Saran

Penulis juga memberikan saran agar dapat dijadikan bahan evaluasi kepada Biro Umum dan Perlengkapan khususnya dan juga kepada pihak yang berkompeten .

1. Melakukan penggabungan secara *online* seluruh satuan kerja (SKPD) pengguna SIMDA Keuangan, sehingga dirasa perlu adanya pengendalian yang kuat, dan memiliki prosedur pengamanan yang baik juga diharapkan

akan terus menambah pemahaman terkait penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan menerapkan SIMDA Keuangan itu sendiri.

2. Meningkatkan koordinasi dan menjalin hubungan baik antara BPKAD dengan BPKP sehingga proses feedback dan respon perbaikan akan selalu terjangkau dengan baik dan cepat.
3. Diharapkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk lebih teliti dalam pembuatan jurnal, karena jurnal merupakan salah satu bagian terpenting dalam siklus akuntansi. Selain itu juga diharapkan agar dapat mengoptimalkan penggunaan kode rekening untuk memudahkan pengklasifikasian dan juga pada saat pencatatan. Selain itu penggunaan kode rekening juga memudahkan pemakai laporan keuangan untuk menganalisa laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar dan Wibowo. 2011. *Akuntansi Keuangan Dasar 2*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Agyei, Paul Mensah., dan Kilika, James M. 2013. *The Relationship between Service Quality and Customer Loyalty in the Kenyan Mobile Telecommunication Service Industry*. European Journal of Business and Management. Vol.5, No.23.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2013. *Kode Etik Dan Standar Audit. Edisi Kelima*. Bogor: Pusdiklat BPKP.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Edisi Ketiga*: Jakarta: Erlangga.
- Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo. 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)*. Jurnal STIE Semarang. Vol 5 No. 3, Edisi Oktober 2013.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT.Indeks.
- Edhy Sutanta. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Erlina dan Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan: Brama Ardian.
- Geri, Morgan dan Carol Hamilton. 2009. *Obstetri dan Ginekologi Panduan Praktik*. Jakarta: EGC.
- Gu, Feng and John P Li. 2007. *The Credibility of Voluntary Disclosure and Insider Stock Transaction*. Journal of Accounting Research Vol. 45 No.4.
- Halim Abdul dan Kusufi Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ihyaul Ulum. 2012. *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Iman Mulyana Dwi Suwandi. 2010. *Citra Perusahaan Seri Manajemen Pemasaran*. www.e-iman.uni.cc.
- Kurniawan, Ardeno. 2012. *Audit Internal: Nilai Tambah Bagi Organisasi*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.

- Lasoma, Vicky Agustiawan. 2012. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara*. *Jurnal Akuntansi*. Vol 2. No. 1.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Muindro Renyowijoyo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Narimawati, Umi. 2010. *Metodologi Penelitian: Dasar Penyusun Penelitian. Ekonomi*. Jakarta: Genesis.
- Nordiawan Deddi dan Hayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permadi. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (studi kasus pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat)*.
- Rahadi, D. Rianto. 2007. *Peranan Sistem Informasi dan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan di Sektor Publik. Seminar Nasional Teknologi 2007*. Yogyakarta.
- Riana, Susilawati. *Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Study & Accounting Research*. Vol. XI No. 1.
- Satries, W. I. 2011. *Efektivitas Program Pemberdayaan Pemuda Pada Organisasi Kepemudaan Al Fatih Ibudarrurrohman Kota Bekasi*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemarso, SR. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar. Buku 1. Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suranto. 2007. *Komunikasi Efektif Untuk Mendukung Kinerja Perkantoran*. Yogyakarta: UNY.
- Ulum, I. 2008. *Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Di Indonesia. Call For Paper Simposium Nasional Akuntansi XI*. Ikatan Akuntan Indonesia. Pontianak.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Keuangan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

LAMPIRAN WAWANCARA

Wawancara di buat pada tanggal 28 Januari 2018 di Biro Umum dan Perlengkapan SetdaprovSU yang beralamat jalan P.Diponegoro No.30 Medan.

Identitas Narasumber :

- Nama : Rizka Signorita Siregar, A.Md
- NIP : 19870304 200902 2 001
- Gol : II/d
- Jabatan : Staf

No.	Daftar Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Apa itu Sistem Informasi Manajemen Daerah	Sistem Informasi Manajemen Daerah Merupakan Aplikasi Berbasis IT dari BPKP Pusat Melalui Pemerintah Daerah yang dapat digunakan dalam Mengelola dan Menata Laporan Keuangan .
2	Kendala Apa dalam Penerapan SIMDA Pada Biro Umum dan Perlengkapan SetdaprovSU ?	Belum Adanya dokumentasi mengenai bagan arus ringkasan (summary flowchart) yang memperlihatkan aliran/ arus data, sehingga menyulitkan Kepala Bagian Mengawasi arus informasi yang terdapat dalam satuan entitasnya.
3	Sejak Mulai Kapan Sistem Informasi Manajemen Daerah di Terapkan Pada Biro Umum dan Perlengkapan SetdaprovSU ?	Dimulai Atau di Terapkan nya Sistem Informasi Manajemen Daerah di Biro Umum dan Perlengkapan ini Pada Tahun 2010 .
4	Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Biro Umum dan Perlengkapan SetdaprovSU Sudah Berjalan Maksimal ?	Belum Sepenuhnya Maksimal, Karena Adanya Keterlambatan Penyerahan Dokumen dan Data Sehingga Belum Berjalan Maksimal dan Tepat Waktu .

5	Apa Dasar Akuntansi Yang di Gunakan dalam Menyusun Laporan Keuangan pada Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu ?	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP Bahwa Laporan Keuangan Disusun dan Disajikan Sesuai dengan SAP Berbasis AkruaI Pada Pemerintah, Penyusunan APBD Mengacu Pada Peraturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6	Terkait dengan Laporan Keuangan , Apa Saja Laporan Keuangan yang di Susun oleh Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu ?	Sebagai entitas (SKPD) Kami Menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan
7	Jelaskan Apa Tujuan dari dilakukannya Pengelolaan Keuangan Daerah ?	Biro Umum dan Perlengkapan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Memiliki Tujuan Utama Yakni Agar Seluruh Penyusunan APBD Semaksimal Mungkin dapat Menunjukkan Latar Belakang Pengambilan Keputusan dalam Penetapan Arah Kebijakan Umum.
8	Siapa Saja Yang Memiliki Kekuasaan Dalam Pengelolaan Keuangan ?	Dilaksanakan Oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola APBD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran / Barang Daerah .
9	Dasar Hukum Apa yang Digunakan Untuk Melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah di Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu ?	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara - UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah - UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional - UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah - UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

		UU tersebut menjadi acuan atas dasar pemikiran adanya keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien .
10	Siapa saja yang berhak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah ?	Pengawasan dilakukan oleh beberapa lembaga diantaranya BPK-RI, Inspektorat Pemprov dan DPRD, serta peran masyarakat yang paling penting dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang bersangkutan .